



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN **MAMUJU TENGAH**
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2029. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 serta sekaligus sebagai evaluasi dan bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ARSAL ARAS

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

Daftar isi

Kata pengantar	i
Pernyataan telah direviu	ii
Daftar isi	iii
Bab I pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Kondisi Geografi dan Demografi	2
1. Luas Wilayah Dan Batas Wilayah	2
2. Topografi.....	2
3. Geologi.....	3
4. Hidrologi.....	3
5. Demografi	4
1.5 Gambaran Umum.....	5
1.6 Sumber Daya Manusia (SDM)	8
1.7 Isu strategis	9
Bab II perencanaan kinerja	14
2.1 Visi Misi Kabupaten Mamuju Tengah	14
2.2 Tujuan Dan Sasaran	14
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	15
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.5 Perjanjian kinerja 2024.....	18
Bab III akuntabilitas kinerja	21
3.1 Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja.....	22
3.2 Akuntabilitas Keuangan	35
Bab IV penutup.....	36
lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang capaian kinerja dan prestasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah selama tahun 2025.

2. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 adalah:

1. Mengukur capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program/kegiatan.

3. Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk perbaikan di masa mendatang.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah kepada masyarakat.

1.3 Dasar Hukum

1. undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1.4 Kondisi Geografi dan Demografi

1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Mamuju Tengah terletak di Provinsi Sulawesi Barat pada posisi 10 47' 82" – 20 17' 31" Lintang Selatan dan 1190 08' 13" – 1190 24' 08" Bujur Timur. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah sebesar 3.100,87 km² yang secara administratif terbagi ke dalam lima kecamatan dan terdiri dari 54 desa. Dan memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara); Selatan – Kabupaten Mamuju; Barat – Selat Makassar; Timur – Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Topografi

a) Kemiringan Lahan

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Mamuju Tengah bervariasi dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian antara 0-2.600 meter di atas permukaan laut (dpl). Di wilayah bagian barat merupakan kawasan pesisir pantai dengan topografi dataran rendah dan ketinggian <25 meter di atas permukaan laut (dpl). Kawasan ini merupakan fisiografi dataran erisional dan dataran koluvial yang subur dan telah berkembang menjadi Kawasan permukiman, pertanian, dan

perkebunan. Di beberapa tempat tampak adanya genangan yang menandakan drainase buruk dan rawan terhadap bencana banjir.

b) Ketinggian Lahan

Makin ke timur wilayah ini semakin tinggi dengan topografi perbukitan dengan torehan-torehan alur air yang pada saat terjadi hujan membawa aliran permukaan menuju sungai utama, yakni S. Budong-budong, S. Karama, dan S. Karosa. Pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah ketinggian topografi mencapai ketinggian 2.600 meter dpl. Ketinggian tempat di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dikelompokkan menjadi beberapa kelas ketinggian sebagai berikut:

- (1) Kelas ketinggian 50 – 500 m dpl, seluas 159.700,40 Ha
- (2) Kelas ketinggian 500 – 1000 m dpl, seluas 61.820,40 Ha
- (3) Kelas ketinggian 1000 – 1500 m dpl, seluas 38.953,95 Ha
- (4) Kelas ketinggian 1500 – 2000 m dpl, seluas 32.089,89 Ha
- (5) Kelas ketinggian 2000 – 2600 m dpl, seluas 8.872,36 Ha

3. Geologi

a) Struktur dan Karakteristik

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Mamuju 2013 dan Lembar Pasangkayu 2014, skala 1:250.000 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 2010) wilayah Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari 7 Formasi, yaitu Formasi Latimojong (Kls), Aluvium (Qa), Formasi Budong-Budong (Qb), Batugamping Koral (Ql), Batuan Terobosan (Tmpi), Formasi Lariang (TQp), Formasi Sekala (Tmps), Batuan Gunungapi Talaya (Tmtv), Batuan Gunungapi Lamasi (Toml), Formasi Pasangkayu (TQp), dan Kompleks Wana (TRw).

b). Potensi Kandungan

Sedang untuk kandungan geologi di Kabupaten Mamuju Tengah secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni kelompok bahan galian konstruksi dan kelompok galian industri.

4. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui oleh 7 sungai (pembinaan Sungai wilayah III) yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar. Sungai-sungai

tersebut adalah Sungai Budong-Budong, Sungai Lumu, Sungai Karama, Sungai Karossa, Sungai Benggaulu, Sungai Kamansi, dan Sungai Panggajoan. Dalam sistem kerja wilayah sungai, sungai-sungai di Kabupaten Mamuju Tengah ini termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Karama, yang meliputi DAS Karama, DAS Budong-Budong dan DAS Karossa. Hingga saat ini sungai-sungai tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan karena di wilayah ini belum banyak kegiatan pembangunan baik di bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri yang banyak membutuhkan air baku dari badan air permukaan yang ada. Kondisi badan air permukaan di wilayah ini semakin terancam dengan adanya kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian rakyat di daerah tengah dan hulu DAS. Indikasi kerusakan DAS ini terbukti dengan seringnya terjadi banjir pada saat musim hujan. Oleh karena itu penataan daerah aliran sungai di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dan wilayah kabupaten sekitarnya sangat mendesak.

5. Demografi

1) Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Data penduduk kabupaten mamuju tengah pada tahun 2024 berdasarkan survey statistik data konsolidasi bersih Semester I Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 143,270 jiwa penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 2020 sebesar 1,15 persen setiap tahunnya. Jumlah tersebut terdiri atas 73.609 jiwa laki-laki dan 69.665 jiwa perempuan. Jumlah penduduk akan terus meningkat seiring dengan mobilisasi penduduk dan bertambahnya angka kelahiran.

, 2025 Distribusi penduduk tertinggi di Kabupaten Mamuju Tengah berada di Kecamatan Topoyo dengan jumlah penduduk yang tercatat sebesar 37,9 ribu jiwa atau 26,45 persen dari total penduduk Mamuju Tengah. Sementara itu distribusi penduduk terkecil berada di Kecamatan Pangale dengan jumlah penduduk sebesar 15,33 ribu jiwa atau 10,70 persen dari total penduduk Mamuju Tengah.

1.5 GAMBARAN UMUM

Kabupaten Mamuju tengah merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB).

Dilihat dari aspek historis, sejarah perjuangan pembentukan Mamuju Tengah, sehingga diharapkan mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerja dalam menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan susunan pemerintah dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan tersebut meliputi :

- 1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, PUPR, Perumahan Rakyat, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial.
- 2) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi.

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH		
Sekretariat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Inspektorat
BADAN		
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KECAMTAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kecamatan pangale
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		Kecamatang budong- budong
DINAS		Kecamtan topoyo
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kecamatan tobadak
DINAS KESEHATAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kecamatan karossa
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PERHUBUNGAN	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
DINAS SOSIAL	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PERIKANAN	

SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS PERHUBUNGAN	
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
DINAS PERIKANAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
RSUD		

- 4) Urusan Penunjang Pemerintahan meliputi Perencanaan dan Pembangunan, Urusan Penelitian dan Pengembangan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan.

1.6 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah, yang disajikan dalam dokumen Mamuju Tengah Dalam Angka Tahun 2025 yang rilis pada tanggal 28 februari 2025, jumlah pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten mamuju Tengah berjumlah 4.028 . jumlah tersebut merupakan jumlah total berdasarkan Tingkat kepangkatan dan jenis kelamin. Dan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berjumlah 1.341, jumlah tersebut merupakan jumlah total berdasarkan Tingkat kepangkatan dan jenis kelamin.

Tabel 2.3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mamuju Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024
Number of Mamuju Regency Government's Civil Servants by Hierarchy and Sex (people), Desember 2024

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Golongan I/Range I			
1. I/A (Juru Muda/Junior Clerk)	0	0	0
2. I/B (Juru Muda Tingkat I/First Class Junior Clerk)	2	0	2
3. I/C (Juru/Clerk)	3	0	3
4. I/D (Juru Tingkat I/First Class Clerk)	5	1	6
Golongan II/Range II			
5. II/A (Pengatur Muda/Junior Supervisor)	19	3	22
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I/First Class Junior Supervisor)	38	14	52
7. II/C (Pengatur/Supervisor)	105	74	179
8. II/D (Pengatur Tingkat I/First Class Supervisor)	118	152	270
Golongan III/Range III			
9. III/A (Penata Muda/Junior Superintendent)	200	303	503
10. III/B (Penata Muda Tingkat I/First Class Junior Superintendent)	222	310	532
11. III/C (Penata/Superintendent)	221	353	574
12. III/D (Penata Tingkat I/First Class Superintendent)	352	526	878
Golongan IV/Range IV			
13. IV/A (Pembina/Administrator)	169	255	424
14. IV/B (Pembina Tingkat I/First Class Administrator)	209	253	462
15. IV/C (Pembina Utama Muda/Junior Administrator)	63	55	118
16. IV/D (Pembina Utama Madya/Middle Administrator)	2	0	2
17. IV/E (Pembina Utama/Senior Administrator)	1	0	1
Jumlah/Total	1.729	2.299	4.028

Tabel 2.3.4 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024
Number of Mamuju Regency Government's Grade by Hierarchy and Sex (people), Desember 2024

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
I	0	0	0
II	0	0	0
III	0	0	0
IV	0	0	0
V	0	0	0
VI	0	0	0
VII	33	134	167
VIII	0	0	0
IX	284	860	1.144
X	5	25	30
XI	0	0	0
XII	0	0	0
XIII	0	0	0
XIV	0	0	0
XV	0	0	0
XVI	0	0	0
XVII	0	0	0
Jumlah/Total	322	1.019	1.341

Sumber. Mamuju Tengah Dalam Angka 2025

1.7 Permasalahan dan Isu Strategis

1.7.1 Permasalahan

1. Masih Tingginya Kemiskinan dan Ketimpangan Tingkat kemiskinan di Mamuju Tengah masih relatif tinggi ditandai dengan angka kemiskinan yang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional akan tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Barat . Dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan kenaikan harga barang dan rendahnya pendapatan masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya garis kemiskinan sehingga daya beli masyarakat utamanya masyarakat rentan miskin menjadi menurun. Tingkat ketimpangan pendapatan di Mamuju Tengah berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara relatif, ketimpangan Mamuju

Tengah cukup tinggi ditandai dengan kontribusi PDRB Mamuju Tengah terhadap PDRB Sulawesi Barat yang rendah dibandingkan dengan kabupaten lain.

2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mamuju Tengah masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Barat dan nasional. Faktor penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia ini antara lain karena keterbatasan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terpencil dan pedesaan, masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan menengah dan tinggi, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang belum merata dan masih di bawah standar, rendahnya literasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan, tingkat kemiskinan yang masih tinggi sehingga banyak keluarga lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mewujudkan visi pembangunan yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan inovatif untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM, melalui perbaikan layanan dasar, penguatan kualitas guru dan tenaga kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

3. Masih rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah adalah rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro kecil (UMK) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Rendahnya pendapatan masyarakat ditandai oleh PDRB per Kapita di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas perekonomian daerah, karena belum berkembangnya sektor industri manufaktur yang bernilai tambah tinggi. Sektor unggulan daerah seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang lebih dari 45% terhadap struktur PDRB, masih didominasi oleh kegiatan tradisional berteknologi rendah, input produksi yang minim, serta keterbatasan akses terhadap pasar, pembiayaan, dan inovasi teknologi. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja di sektor-sektor tersebut masih rendah. Data

menunjukkan bahwa sebagian besar petani dan nelayan masih bergantung pada metode konvensional, dengan nilai produktivitas lahan dan hasil tangkapan yang fluktuatif dan tidak kompetitif. Selain itu, minimnya keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja juga berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas kerja di berbagai sektor. Hal ini semakin diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap pelatihan vokasional, pendampingan usaha, serta permodalan bagi UMKM. Permasalahan rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat tidak hanya menjadi tantangan ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap dimensi sosial, seperti meningkatnya kerentanan terhadap kemiskinan, migrasi tenaga kerja usia produktif, serta keterbatasan daya beli dan kesejahteraan keluarga

4. Masih rendahnya Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menarik investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini, daya saing Kabupaten Mamuju Tengah masih tergolong rendah, baik dari aspek infrastruktur, kualitas SDM, efisiensi birokrasi, maupun kapasitas inovasi dan pengelolaan potensi unggulan daerah. Keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, kualitas pelayanan publik yang masih belum optimal, rendahnya kapasitas inovasi dan teknologi, kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, belum optimalnya pengelolaan potensi unggulan daerah menjadi indikator-indikator yang mencerminkan masih rendahnya daya saing Mamuju Tengah.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, hingga saat ini, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun kultural yang menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi secara menyeluruh. Permasalahan tata kelola tercermin dalam berbagai aspek diantaranya rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Meskipun telah terdapat beberapa inisiatif digitalisasi, namun implementasinya masih terbatas, belum terintegrasi antar perangkat daerah dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat luas khususnya di wilayah pedesaan dan

terpencil. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pelayanan dan rendahnya kepuasan masyarakat. Selain itu kualitas perencanaan dan penganggaran yang belum berbasis kinerja sepenuhnya, masih ditemukan inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, rendahnya keterpaduan antar-sektor, serta lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Masih terbatasnya kapasitas dan integritas ASN dimana tingkat kompetensi, profesionalisme, serta kedisiplinan ASN belum merata di seluruh unit kerja. Pelatihan dan pengembangan SDM ASN juga belum sepenuhnya berbasis kebutuhan jabatan dan tantangan pelayanan publik yang dinamis. Kurangnya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik, Mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, maupun penilaian layanan publik masih bersifat formalistik dan belum berdampak nyata terhadap pengambilan kebijakan. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga masih menghadapi hambatan dalam hal akses dan kualitas data. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan tata Kelola pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah belum mampu mendorong percepatan pembangunan secara efektif dan inklusif. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah berpotensi menurun dan berbagai program strategis daerah berjalan kurang optimal.

6. Kualitas Infrastruktur Dasar Dan Wilayah Yang Belum Optimal Infrastruktur dasar memegang peranan penting dalam menunjang aktivitas sosial, ekonomi, serta pelayanan publik. Namun, hingga saat ini, kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta keterhubungan wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah masih belum optimal, yang menghambat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspek infrastruktur yang masih menjadi tantangan utama antara lain keterbatasan konektivitas antarwilayah. Meskipun telah dilakukan pembangunan dan peningkatan jalan, sebagian besar jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Akses antar kecamatan, serta konektivitas ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik masih belum memadai, khususnya di wilayah pegunungan dan pelosok. Kedua, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang masih rendah. Cakupan layanan air bersih layak dan sanitasi layak masih terbatas hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama di desa-desa terpencil. Layanan

listrik yang belum merata, meskipun rasio elektrifikasi meningkat, masih terdapat dusun yang belum mendapatkan pasokan listrik secara stabil. Kondisi ini menghambat aktivitas ekonomi dan pembelajaran terutama pada malam hari. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang belum memadai Masih terdapat kesenjangan distribusi fasilitas pendidikan dan kesehatan, baik dari segi jumlah, kondisi bangunan, maupun ketersediaan tenaga pendukung. Beberapa sekolah masih berada dalam kondisi fisik tidak layak, serta belum memiliki peralatan dan sarana pendukung yang memadai. Infrastruktur digital yang terbatas, akses terhadap internet dan jaringan telekomunikasi masih belum merata. Blank spot masih ditemukan di beberapa wilayah, membatasi akses masyarakat terhadap informasi, layanan digital, dan peluang ekonomi berbasis teknologi.

1.7.2 Isu Strategis

a. Isu Global

1. Perubahan Paradigma Pembangunan Global Paradigma pembangunan global bergeser dari fokus pertumbuhan ekonomi semata menuju pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kesejahteraan manusia. Tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, krisis pangan-energi, dan degradasi lingkungan mendorong penerapan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Arah baru pembangunan menekankan transisi energi bersih, ekonomi hijau, inklusi sosial, inovasi teknologi, serta ketahanan terhadap risiko global, sehingga keberhasilan pembangunan diukur dari kualitas hidup, pemerataan, dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

2. Kebijakan Pro-Lingkungan yang memperhatikan Perubahan Iklim, Daya

Dukung dan Daya Tampung. Perubahan iklim global menimbulkan ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan daerah melalui peningkatan suhu, cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, dan degradasi ekosistem. Untuk itu, pembangunan harus memperhatikan daya dukung (kemampuan wilayah menyediakan sumber daya secara berkelanjutan) dan daya tampung (kemampuan menyerap limbah dan tekanan aktivitas manusia). Kebijakan pro-lingkungan diarahkan untuk mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke semua sektor pembangunan, melindungi dan merehabilitasi ekosistem penting, mendorong

penggunaan energi terbarukan, menata ruang berbasis lingkungan, serta meningkatkan ketahanan Masyarakat terhadap bencana iklim. Langkah ini memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap selaras dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang.

3. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Kawasan Lebih Hijau Pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau merupakan bagian dari tren global yang menggabungkan kebutuhan peningkatan akses dan konektivitas wilayah dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Konsep ini menekankan pengembangan jaringan transportasi, energi, dan utilitas yang rendah emisi, hemat energi, serta meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Infrastruktur hijau mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan air berkelanjutan, dan desain yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dalam konteks pembangunan daerah, pendekatan ini mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca melalui transportasi publik berbasis listrik, jalur logistic efisien, dan integrasi tata ruang yang mempertahankan kawasan lindung. Pembangunan konektivitas hijau juga mendorong efisiensi ekonomi wilayah, memperkuat integrasi pasar, dan meningkatkan akses masyarakat ke pusat pertumbuhan tanpa mengorbankan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan menjadi kunci bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan serta berketahanan iklim.

b. Isu Nasional

1. Pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam Kerangka Superhub Ekonomi Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu agenda strategis nasional yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai **superhub ekonomi** yang mengintegrasikan berbagai sektor unggulan. Konsep superhub ini dirancang untuk menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru yang menghubungkan rantai pasok nasional dan global, mengembangkan industri berteknologi tinggi, memperkuat ekonomi hijau, serta menjadi model kota cerdas (*smart city*) dan berkelanjutan.

Sebagai isu strategis dalam perencanaan pembangunan, IKN memiliki peran

penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), memicu investasi di sektor infrastruktur, energi terbarukan, transportasi modern, dan kawasan industri ramah lingkungan. IKN juga dirancang untuk menjadi pusat riset, inovasi, dan ekonomi digital, sehingga dapat meningkatkan daya saing nasional di tingkat global. Bagi daerah-daerah penyangga, termasuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan, keberadaan IKN membuka peluang integrasi ekonomi, peningkatan arus perdagangan, pengembangan logistik, serta penyerapan tenaga kerja. Namun, pengembangannya memerlukan koordinasi lintas wilayah, pengelolaan lingkungan yang ketat, dan penguatan konektivitas agar fungsi superhub ekonomi dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi nasional

2. Bonus Demografi dengan SDM Berkualitas

Bonus demografi merupakan kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif, sehingga secara potensial dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia diproyeksikan menikmati puncak bonus demografi pada periode 2030–2040, yang jika dikelola dengan tepat dapat menjadi “jendela peluang” untuk meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat daya saing, dan mendorong transformasi ekonomi.

Sebagai isu strategis nasional dalam perencanaan pembangunan, bonus demografi hanya akan memberikan manfaat optimal jika didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini mencakup peningkatan akses dan mutu pendidikan, keterampilan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, kesehatan masyarakat yang prima, serta karakter SDM yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.

Dalam konteks RPJMN dan RPJMD, pemanfaatan bonus demografi dengan SDM berkualitas memerlukan sinergi kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan, termasuk penguatan literasi digital serta penguasaan teknologi. Tanpa dukungan kualitas SDM yang memadai, bonus demografi justru berisiko menjadi beban pembangunan akibat meningkatnya

pengangguran, ketimpangan, dan masalah sosial. Oleh karena itu, strategi pengembangan SDM unggul menjadi kunci untuk mengubah momentum bonus demografi menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Lebih Cepat

Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih cepat merupakan salah satu isu strategis nasional yang bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. KTI, yang mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, pertambangan, energi terbarukan, pariwisata, serta keanekaragaman hayati. Namun, potensi ini belum dioptimalkan secara maksimal akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya konektivitas, dan kualitas sumber daya manusia yang belum merata.

Akselerasi pembangunan KTI diarahkan pada penguatan konektivitas antarwilayah, penyediaan infrastruktur dasar dan digital, peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi industri, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan pasar nasional dan global. Kebijakan ini juga menekankan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pemerataan akses layanan publik. Dalam kerangka perencanaan nasional dan daerah, percepatan pembangunan KTI memiliki peran strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan baru, serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah. Implementasi yang efektif memerlukan sinergi lintas sektor, investasi strategis, dan dukungan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat maupun daerah.

C.Isu Regional

1. Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA

Sulawesi memiliki potensi besar untuk menjadi penunjang superhub ekonomi Nusantara dan industri berbasis sumber daya alam (SDA) karena sejumlah

faktor kunci: (i) Keanekaragaman Sumber Daya Alam: Sulawesi kaya akan sumber daya alam seperti tambang mineral (nikel, emas, tembaga), kehutanan yang melimpah, serta potensi pertanian yang subur. Keanekaragaman ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan industri berbasis SDA di pulau tersebut. (ii) Kawasan Logistik dan Transportasi: Sulawesi memiliki posisi geografis yang strategis di antara kepulauan Indonesia. Dengan infrastruktur transportasi yang berkembang, termasuk pelabuhan laut dan bandara internasional, Sulawesi dapat menjadi pusat logistik yang penting untuk distribusi barang dan jasa di kawasan Nusantara. (iii) Potensi Industri Pengolahan: SDA yang melimpah memberikan peluang besar untuk pengembangan industri pengolahan di Sulawesi. Misalnya, nikel dan tembaga dapat diolah menjadi logam, kayu dapat dijadikan bahan bangunan dan furniture, sementara hasil pertanian seperti kakao dan kelapa dapat diolah menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi. (iv) Investasi dan Pengembangan Infrastruktur: Untuk mendukung peran Sulawesi sebagai superhub ekonomi dan pusat industri berbasis SDA, diperlukan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur. Ini termasuk pembangunan jaringan jalan dan rel, perluasan pelabuhan dan bandara, serta penyediaan energi dan air bersih yang memadai. (v) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Inisiatif Pemerintah: Pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan industri berbasis SDA di Sulawesi melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK menyediakan insentif pajak, fasilitas infrastruktur, dan kemudahan investasi untuk menarik investor domestik dan asing ke daerah tersebut. (vi) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan juga penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Sulawesi. Tenaga kerja yang terampil dan terdidik akan mendukung pertumbuhan industri dan meningkatkan daya saing regional.

Dengan memanfaatkan kekayaan alamnya, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong investasi serta pengembangan industri berbasis SDA, Sulawesi memiliki potensi besar untuk menjadi penunjang superhub ekonomi Nusantara

dan berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

2. Konektivitas Antar Wilayah (Darat, Laut dan Udara)

Terhubungnya wilayah dalam suatu negara disebut dengan konektivitas antar wilayah. Konektivitas antar wilayah merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan suatu negara. Misalnya Indonesia meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan cara membangun jalan, jalan tol, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan pembangunan angkutan massal seperti MRT. Umumnya pembangunan wilayah mengalami ketimpangan, di mana pembangunan di kota berkembang lebih pesat dibanding pembangunan di daerah. Sehingga dibutuhkan konektivitas antar wilayah untuk pemeratakan pembangunan tersebut.

Manfaat konektivitas antar wilayah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas wilayah. Manfaat pertama dari konektivitas antar wilayah adalah kemudahan akses dari suatu wilayah lainnya. Membuat suatu wilayah yang awalnya terjamah menjadi lebih mudah didatangi. Dengan peningkatan aksesibilitas suatu wilayah, pengembangan dari wilayah tersebut dapat dilakukan demi kesejahteraan masyarakatnya.
2. Kemudahan akses sumber daya. Konektivitas daerah memudahkan akses sumber daya maupun berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang maupun sumber daya dapat dikirim dari tempat asalnya ke wilayah lain.
3. Peningkatan pelayanan umum. Konektivitas daerah dapat meningkatkan pelayanan umum masyarakat. Misalnya pasokan air bersih, aliran listrik, penanggulangan sampah dan limbah, pendidikan, kantor imigrasi, pembuatan surat izin mengemudi, kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), keamanan, juga penjara. Pemerataan pelayanan umum terutama di bidang pendidikan dapat menciptakan generasi muda bangsa yang terdidik. Pemerataan pelayanan umum di bidang kesehatan, memberikan masyarakat kemudahan untuk berobat saat sakit, mengalami kecelakaan, maupun akan melahirkan.

4. Peningkatan investasi. Dengan adanya konektivitas antar wilayah, peluang pembukaan bisnis menjadi lebih tinggi. Perkembangan bisnis yang bagus dalam suatu wilayah menarik para investor untuk memberikan modal, hal ini jelas dapat memajukan ekonomi masyarakat. Kerjasama Regional Sulawesi
5. Peningkatan kesempatan kerja. Dengan berkembangnya bisnis dan ketersediaan investor, lapangan kerja baru akan tersedia. Peningkatan kesempatan kerja bisa menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan perkapita.
6. Pengembangan infrastruktur untuk konektivitas antar wilayah juga membutuhkan banyak tenaga kerja. Hal tersebut jelas menjadi peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
7. Peningkatan sarana dan prasarana. Dengan adanya konektivitas antar wilayah, pembangunan sarana dan prasarana akan lebih cepat karena mudahnya transportasi dan juga dana yang tersedia lebih besar. Mudahnya akses ke suatu wilayah, membuat turis dalam negeri walaupun luar negeri bisa berkunjung dengan aman dan nyaman ke berbagai tempat wisata.
8. Penurunan konflik antar wilayah. Konektivitas antar wilayah dapat menurunkan konflik antar wilayah, baik konflik antar warga maupun konflik pembangunan antar pemerintah suatu wilayah. Hal tersebut karena konektivitas antarwilayah membuat wilayah-wilayah saling bekerja sama untuk memajukan daerah bukannya saling berselisih.

3. Kebencanaan dan Lingkungan Hidup

Sulawesi Barat memiliki karakteristik geografis, geologis, dan klimatologis yang membuatnya rentan terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, cuaca ekstrem, dan abrasi pantai. Posisi wilayah yang berada di zona sesar aktif Palu-Koro serta kondisi topografi yang berbukit-bukit meningkatkan risiko gempa bumi dan longsor. Selain itu, perubahan iklim global memicu intensitas hujan ekstrem yang memperbesar potensi banjir bandang dan kerusakan infrastruktur, khususnya di daerah rawan.

Dari sisi lingkungan hidup, Sulawesi Barat menghadapi tantangan degradasi

hutan, konversi lahan yang tidak terkendali, penurunan kualitas tanah, pencemaran perairan, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Tekanan aktivitas manusia seperti pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur seringkali belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga berisiko memperparah kerentanan bencana.

Sebagai isu strategis regional, pengelolaan kebencanaan dan lingkungan hidup di Sulawesi Barat memerlukan kebijakan terpadu yang mencakup: penguatan mitigasi dan adaptasi bencana, penataan ruang berbasis risiko, rehabilitasi dan konservasi ekosistem, pengendalian pemanfaatan lahan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan. Langkah ini penting untuk melindungi kehidupan dan aset daerah, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta mendukung pembangunan wilayah yang tangguh dan berkelanjutan.

D. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah

1. Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Pemenuhan infrastruktur dasar merupakan salah satu isu strategis utama di Kabupaten Mamuju Tengah karena keberadaannya menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi daerah. Sebagai daerah yang relatif baru berkembang, sebagian wilayah Mamuju Tengah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, perumahan layak huni, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya konektivitas antarwilayah, terbatasnya akses pelayanan publik, serta kurang optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

Tantangan dalam pemenuhan infrastruktur dasar di Mamuju Tengah antara lain keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang mempersulit pembangunan jaringan transportasi dan utilitas, serta belum meratanya distribusi pembangunan antar-kecamatan. Hal ini menuntut strategi perencanaan yang terarah, integratif, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur

secara merata, pembangunan jalan penghubung pusat produksi dengan pasar, penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak, perluasan jaringan listrik, serta pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai, diharapkan Mamuju Tengah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2. Produktivitas Ekonomi Melalui Penerapan Iptekin

Peningkatan produktivitas ekonomi melalui penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) merupakan isu strategis penting bagi Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendorong daya saing daerah dan penguatan sektor-sektor unggulan. Sebagai daerah dengan potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan, Mamuju Tengah membutuhkan pemanfaatan teknologi tepat guna, inovasi proses produksi, serta pengembangan riset terapan untuk meningkatkan nilai tambah dan efisiensi usaha masyarakat.

Saat ini, sebagian besar pelaku usaha dan petani masih mengandalkan metode konvensional dengan produktivitas yang terbatas. Keterbatasan akses terhadap teknologi modern, rendahnya literasi digital, minimnya fasilitas riset, serta terbatasnya kemitraan dengan sektor industri menjadi tantangan utama. Tanpa penerapan IPTEKIN, potensi sumber daya alam yang besar tidak akan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Ekonomi Biru, Ekonomi Hijau dan Transformasi Digital

Pengembangan ekonomi biru, ekonomi hijau, dan transformasi digital menjadi isu strategis penting bagi Kabupaten Mamuju Tengah karena ketiganya dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, termasuk perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan hasil laut, pariwisata bahari, serta energi terbarukan berbasis laut. Dengan garis pantai yang panjang dan sumber daya laut melimpah, Mamuju Tengah memiliki

peluang besar untuk mengembangkan sektor ini, asalkan dikelola dengan memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir.

Ekonomi hijau mengedepankan prinsip pembangunan rendah emisi, efisiensi sumber daya, dan perlindungan lingkungan. Di Mamuju Tengah, penerapan ekonomi hijau dapat dilakukan melalui pertanian organik, pengelolaan perkebunan berkelanjutan, rehabilitasi lahan kritis, serta pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa. Pendekatan ini tidak hanya menjaga daya dukung lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk daerah.

Transformasi digital menjadi pengungkit utama untuk mempercepat inovasi dan meningkatkan efisiensi berbagai sektor. Pemanfaatan teknologi digital di bidang pertanian, perikanan, perdagangan, layanan publik, dan pendidikan dapat memperluas akses pasar, memperbaiki manajemen usaha, serta meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Namun, percepatan transformasi digital memerlukan penguatan infrastruktur telekomunikasi, literasi digital masyarakat, dan keamanan siber.

Dengan sinergi ketiga strategi ini, Mamuju Tengah dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi tantangan global.

4. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan

Penguatan peran wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan merupakan isu strategis penting bagi Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mamuju Tengah memiliki wilayah perkotaan yang menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan jasa, sementara wilayah perdesaan menjadi basis produksi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan.

Namun, keterkaitan ekonomi antara keduanya masih belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan distribusi layanan publik.

Pendekatan pembangunan yang menjadikan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan bertujuan menciptakan keterkaitan fungsional. Perkotaan

berperan sebagai pusat layanan, industri pengolahan, pemasaran, dan distribusi, sedangkan perdesaan menyediakan bahan baku, tenaga kerja, serta destinasi wisata berbasis alam dan budaya. Hubungan yang saling menguatkan ini akan mempercepat aliran barang, jasa, informasi, dan investasi.

Arah kebijakan meliputi pengembangan infrastruktur transportasi penghubung antarwilayah, pembangunan pasar dan sentra distribusi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan sektor UMKM, serta pengembangan layanan publik yang merata. Dengan strategi ini, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang seimbang, penyerapan tenaga kerja yang lebih luas, dan terwujudnya integrasi ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Mamuju Tengah.

5. Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Ketahanan bencana dan perubahan iklim merupakan isu strategis yang sangat relevan bagi Kabupaten Mamuju Tengah mengingat wilayah ini memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan abrasi pantai. Secara geologis, Mamuju Tengah berada dekat zona sesar aktif dan memiliki kondisi topografi yang memicu risiko longsor, sementara perubahan iklim meningkatkan frekuensi serta intensitas hujan ekstrem yang memicu banjir dan kerusakan infrastruktur.

Dampak perubahan iklim juga memengaruhi sektor pertanian, perikanan, dan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan produktivitas lahan, kerusakan ekosistem pesisir, serta meningkatnya ancaman penyakit berbasis lingkungan. Kondisi ini memerlukan langkah adaptasi dan mitigasi yang terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

6. Dukungan Terhadap Superhub Ekonomi IKN

Dukungan terhadap pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai *superhub* ekonomi menjadi isu strategis penting bagi Kabupaten Mamuju Tengah mengingat posisi geografisnya yang relatif dekat dengan Kalimantan dan potensi integrasinya dalam rantai pasok IKN. Konsep *superhub* IKN mencakup pengembangan pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan jaringan logistik, perdagangan, industri, energi, serta pusat riset dan inovasi tingkat

nasional.

Bagi Mamuju Tengah, keberadaan IKN membuka peluang besar untuk memperluas pasar produk unggulan daerah seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan olahan makanan, sekaligus menarik investasi pada sektor logistik, jasa, dan infrastruktur pendukung. Selain itu, penguatan konektivitas transportasi laut, darat, dan udara antara Mamuju Tengah dan Kalimantan menjadi kunci untuk memastikan keterlibatan aktif daerah dalam mendukung pasokan barang, tenaga kerja, dan layanan ke IKN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi Misi Kabupaten Mamuju Tengah

Visi

“ MAMUJU TENGAH DAERAH AGROPOLITAN MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN “

Pada rumusan visi ini terkandung makna bahwa pada tahun 2029 wilayah Mamuju Tengah dicirikan sebagai daerah agropolitan, dalam arti sebuah daerah pertanian/perkebunan, yang di dalamnya berkembang Kota Terpadu Mandiri. Kota Terpadu Mandiri tersebut menempatkan Tobadak sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan yang memiliki kecukupan infrastruktur untuk aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya secara terpadu. Kota Terpadu Mandiri di Tobadak terintegrasi dengan pertumbuhan wilayah Topoyo dan Budong-Budong dan saling mendukung dengan pertumbuhan wilayah Pangale dan Karossa dalam basis ekonomi pertanian dan perikanan

Maju adalah kondisi masyarakat Mamuju Tengah pada tahun 2029 yang sehat dan cerdas sehingga mampu berperan sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas dalam mendukung perkembangan daerah agropolitan. Maju juga merupakan gambaran tentang terpenuhinya infrastruktur daerah yang mendukung konektivitas wilayah, pelayanan dasar, aktivitas perekonomian.

Sejahtera adalah kondisi perekonomian daerah yang mampu menjamin pendapatan masyarakat yang tinggi, merata, dan terlindungi dari kerentanan sosial-ekonomi.

Sejahtera juga bermakna terjaminnya ketenteraman dan ketertiban umum dalam suasana interaksi antar umat beragama yang rukun, kebudayaan yang maju, partisipasi pemuda yang kreatif, dan relasi gender yang setara.

Berkelanjutan adalah kondisi alam dan lingkungan Mamuju Tengah yang lestari dan didalam perkembangannya terjalin keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Berkelanjutan juga bermakna terwujudnya tata kelola yang berintegritas serta menjamin kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah..

Misi

(1) Memperkuat transformasi sosial

- (2) Memperkuat transformasi ekonomi
- (3) Memperkuat transformasi tata kelola
- (4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro
- (5) Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi
- (6) Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata
- (7) Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas
- (8) Menjaga kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah

2.2 Tujuan Dan Sasaran

Selanjutnya, ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2025 yaitu:

1. Mewujudkan manusia dan masyarakat yang sehat dan Panjang umur, cerdas dan terpelajar serta terlindungi dari kemiskinan dan kerentanan
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif
4. Mewujudkan kondisi daerah yang aman untuk semua dan terwujudnya stabilitas ekonomi daerah
5. Mewujudkan ketahanan social budaya dalam Bingkai Lalla Tassisara
6. Meningkatkan ketahanan ekologi dalam menghadapi berbagai kerentanan akibat bencana dan perubahan iklim
7. Mewujudkan keseimbangan Pembangunan antar wilayah dan kemajuan desa
8. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur wilayah dan sarana dan prasarana pelayanan dasar
9. Mewujudkan kesinambungan Pembangunan dan daya saing daerah.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Menignkatnya kualitas modal manusia	1	Indeks Pendidikan	Indeks		
		2	Indeks Kesehatan	Indeks		
		3	Prevalensi Stunting	Persen		
2	Berkurangnya penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan	4	Angka kemiskinan	persen		
		5	Gini Ratio			
3	Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	6	Pertumbuhan Ekonomi	persen		

	Perekonomian Daerah secara berkelanjutan	7	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen		
4	Meningktanya kontribusi sektor industry dalam struktur perekonomian daerah	8	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan			
5	Berkembangnya Digitalisasi dan Inovasi Daerah	9	Indeks Masyarakat Digital	Indeks		
		10	Indeks Inovasi Daerah	Indeks		
6	Meningkatnya kualitas produk hukum	11	Indeks Reformasi Hukum	Indeks		
		12	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks		

7	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	13	Opini BPK	WTP		
		14	Nilai Sakip	Nilai		
8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Digital	15	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks		
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	16	Indeks Pelayanan Publik	Indeks		
		17	Skor survey Kepuasan masyarakat	Nilai		
10	Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sosial Politik dan Demokrasi Subtansial	18	Penurunan tingkat gangguan keamanan dan ketertiban	Persen		

		19	persentase penegakan perda	Persen		
11	Terwujudnya Stabilitas Kebutuhan Pokok Masyarakat secara merata	20	Tingkat Inflasi	Nilai		
12	Meningkatnya Literasi keuangan pelaku ekonomi	21	Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Indeks		
13	Terwujudnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	22	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks		
14	Terpeliharanya Adat Istiadat local dan Cagar Budaya	23	Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Persen		
15	Meningkat Nya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	24	Indeks Resiko Bencana	Indeks		

16	Terpeliharanya Kaulitas Lingkungan Hidup Daerah	25	IKLHD	Indeks		
17	Terwujudnya Kawasan Agropolitan	26	Persentase desa yang memiliki apangan usaha berbasis industry dan jasa layanan pertanian	Persen		
		26	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	Persen		
18	Terwujudnya Pedesaan sebgaii pusat pertumbuhan baru dan berkelanjutan	27	Nilai SDG's desa	Nilai		
19	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana pelayanan dasar serta sarana prasarana pusat	28	Indeks daya saing infrastruktur daerah	Indeks		

	oertumbuhan dan pengembangan agropolitan					
20	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran dalam menunjang kesinambungan pembangunan	29	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks		
21	Meningkatnya daya saing investasi daerah	30	Nilai realisasi investasi Kabupaten	Nilai		

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026

Tabel Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

No	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan	1	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai Indeks	$(B \times N \text{ kemandirian jalan kabupaten} + B \times N \text{ Akses Air Minum Layak} + B \times N \text{ Akses Sanitasi Layak} + B \times N \text{ Pemukiman layak huni} + B \times N \text{ Rumah Layak Huni} / 5) \times 100\%$	Laporan Kinerja Dinas PU dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2	Meningkatnya daya Saing Sumber Daya Manusia	2	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	$(B \times N \text{ Angka Rata-rata Lama Sekolah} + B \times N \text{ Angka Harapan Lama Sekolah} + B \times N \text{ Angka Harapan Hidup} + B \times N \text{ Pengeluaran Perkapita} / 4) \times 100\%$	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
		3	Prevalensi Stunting	Persen	Jumlah anak balita stunting pada tahun n / total jumlah anak balita yang diperiksa pada tahun n x 100%	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	4	Angka kemiskinan (persen)	Persen	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - y_i}{Z} \right]^{\alpha}$ Dimana: $\alpha = 2$ Z = garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < Z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
		5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Dimana: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP = Jumlah Pengangguran (orang) PAK = Jumlah Angkatan Kerja (orang)	BPS Kabupaten Mamuju Tengah

4	Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadumandiri	6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	$R(t-1,t) = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Dimana: $R(t-1,t) = \text{laju pertumbuhan ekonomi (\%)}$ $PDRB_t = \text{Jumlah PDRB tahun } t \text{ (Rp)}$ $PDRB_{t-1} = \text{Jumlah PDRB tahun } t-1 \text{ (Rp)}$	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	7	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi KemenPAN RB	KemenPAN RB
		8	Nilai LPPD	Nilai	Hasil evaluasi LPPD	Bagian Pemerintahan Setda
		9	Opini BPK	Kategori	Hasil evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPAD
6	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	10	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	PERSEN	$PG\ K3 = \frac{GK3_{t-1} - GK3_t}{GK3_{t-1}} \times 100\%$ Dimana: $PG\ K3 = \text{Penurunan gangguan K3}$ $GK3_{t-1} = \text{Jumlah gangguan K3 tahun sebelumnya}$ $GK3_t = \text{Jumlah gangguan K3 tahun ini}$	SATPOL
7	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah	11	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (Nilai)	Nilai Indeks	$IKLHD = \frac{IKA + IKU + IKL}{3} \times 100\%$ Dimana: IKA: Indeks Kualitas Air IKU: Indeks Kualitas Udara IKL: Indeks Kualitas Lahan	Dinas Lingkungan Hidup

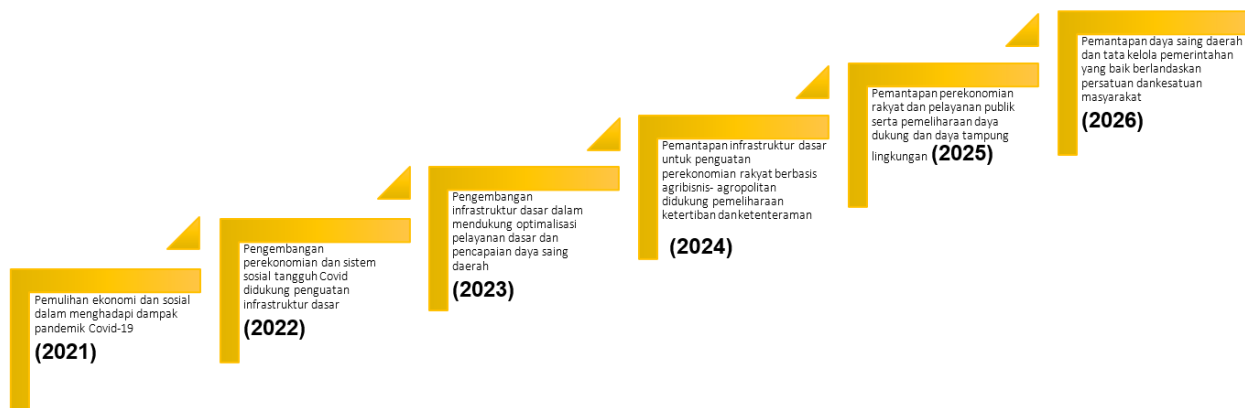


2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Mengefektifkan daya dukung infrastruktur transportasi dan perhubungan, informasi dan komunikasi, perumahan dan pemukiman, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah.
2. Memenuhi ketersediaan data, sumberdaya manusia, dan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan SPM pelayanan dasar yang menjangkau semua target layanan.
3. Meningkatkan kemampuan literasi, resiliensi dampak pandemic dan penanganan 1.000 hari pertama kehidupan, serta daya beli masyarakat untuk hidup yang layak.
4. Memanfaatkan teknologi terkini dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui peran efektif pelaku utama dan pelaku usaha.
5. Pelibatan multistakeholder dalam penanggulangan kemiskinan diiringi dengan penyerapan tenaga kerja dengan pendapatan di atas upah minimum.
6. Pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi pendukung dalam produksi dan pengolahan komoditas unggulan agribisnis berbasis keterkaitan pusat kota dengan kawasan perdesaan.
7. Percepatan implementasi road-map reformasi birokrasi dengan dukungan sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan dari level perangkat daerah hingga pemerintah desa.
8. Penguatan sistem inovasi daerah dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi melibatkan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.
9. Penguatan modal sosial antar kelompok masyarakat untuk memanifestasikan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah yang membawa kemaslahatan untuk semua.
10. Penyadaran pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, penanganan sampah dan limbah seiring dengan penegakan aturan lingkungan hidup.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 pada dasarnya berisi prioritas pembangunan yang akan dijalankan setiap tahun. Setiap tahun dijalankan tema pembangunan tertentu, dan dalam payung tema pembangunan itu dikembangkan kebijakan pembangunan yang diprioritaskan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan substansi yang menjadi tema setiap tahun adalah sebagai berikut.



2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor: 13 / 007.1/II/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ARAS TAMMAUNI
Jabatan : BUPATI MAMUJU TENGAH

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

MamujuTengah, 02 Januari 2025

BUPATI MAMUJU TENGAH,



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	TARGET
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	62,61
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,2
		Prevalensi Stunting	14
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	7,32
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	3,58
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		NILAI PPD	2.99
		OPINI BPK	WTP
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100
7	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd) (Nilai)	75,32

No	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggara Jalan	52.943.257.950,79
2	Program Pengelola Dan Pengembangan Sistem Air Minum	10.343.476.893,44
3	Program Penyelenggara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	574.146.557,00
4	Program Kawasan Permukiman	83.055.535,00
5	Program Pengembangan Perumahan	50.090.586,00
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	61.019.710.256,42
7	Program Pengelolaan Pendidikan	36.167.538.484,00
8	Program Penempatan Tenaga Kerja	19.903.987
9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	115.159.348,00
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	144.004.229,00
11	Program Peningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	53.696.912,00
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	148.207.533.573,51
13	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.100.021.881,00
14	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	52.330.096,00

Mamuju Tengah, 02 Januari 2025

BUPATI MAMUJU TENGAH,

 H. IRAS TAMMAUNI

BAB III

Akuntabilitas kinerja

Target-target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 diukur dan dianalisis tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang tercermin dalam capaian sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidak berhasilan sasaran program dilakukan dengan mengukur indikator sasaran program yang terkait langsung dengan pencapalan sasaran strategis. Analisis capaian sasaran program difokuskan pada IKU yang merupakan indikator kinerja yang terkait langsung terhadap pencapaian sasaran program dan sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progress Positif**), maka digunakan rumus:

% Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (**Progress Negatif**), maka digunakan rumus:

% Capaian = $\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100 \%$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel

Skala yang digunakan bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif dan Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik Sekali
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup

5	<55	Kurang
---	-----	--------

3.1 Analisis Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

Pengukuran Kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	62.61		
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,2	69,17	98,5
		Prevalensi Stunting	14	19.6%	71,4
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	7.32	7.28	100,5
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1.5	1.83%	81,96
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	3.58	5,08	141,9
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100
		NILAI LPPD	3.1	-	-
		OPINI BPK	WTP	WTP	100
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100	25	25
7	Terpeliharabya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd)(Nilai)	75.32	83,48	110,8

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya.

N o	Sasaran	Iku	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisas i	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisas i	Capaian Kinerja (%)	Target	Realis asi	Capaian Kinerja (%)
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	76,3	68,88	90,27	78,8	57,61	73,10	62.61		
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	67,14	67,45	100,46	67,46	68,53	101,58	70,2	69,17	98,5
		Prevalensi Stunting	15	14,89	100,73	14	16,73	80,5	14	19.6	71,4
3	Meningkatkan Kesejahteraan	Angka Kemiskinan	6,13	7,32	80,58	5,17	7,72	50,67	7.32	7.28	100,5

	Sosial Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,85	1,83	101,08	1,80	1,70	105,5	1.5	1.83 %	81,96
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	4,33	2,80	64	5,17	2,98	57,64	3.58	5,08	141,9
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	C	Kurang	CC	CC	100	B	B	100
		NILAI LPPD				2,99			3.1	-	-
		OPINI BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100	100	100	100	100	100	100	25	25
7	Terpeliharabya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragama n Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd)(Nilai)	75,29	78,56	104,34	79	73,32	92,82	75.32	83,48	110,8

3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan target akhir RPJMD

No	Sasaran	Iku	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Kinerja	Predikat
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah		81,16			
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,17	67,69	98,5	102,2	Sangat Baik Sekali
		Prevalensi Stunting	19.6	6,90	71,4	35,2	Kurang
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	7.28	5,50	100,5	75,5	Cukup
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1.83%	2,44	81,96	133,3	Sangat Baik Sekali
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	5,08	6,15	141,9	83,3	Cukup
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100	100	Baik
		NILAI LPPD	-	3,04	-		Belum rilis nilai dari Kemendagri
		OPINI BPK	WTP	WTP	100	100	WTP
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	25	80	25	31,3	Kurang
7	Terpeliharabya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd)(Nilai)	83,48	76,00	110,8	109,8	Baik Sekali

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Kabupaten Yang Ada Di Provinsi Sulawesi Barat

a. Indeks Pembangunan Manusia

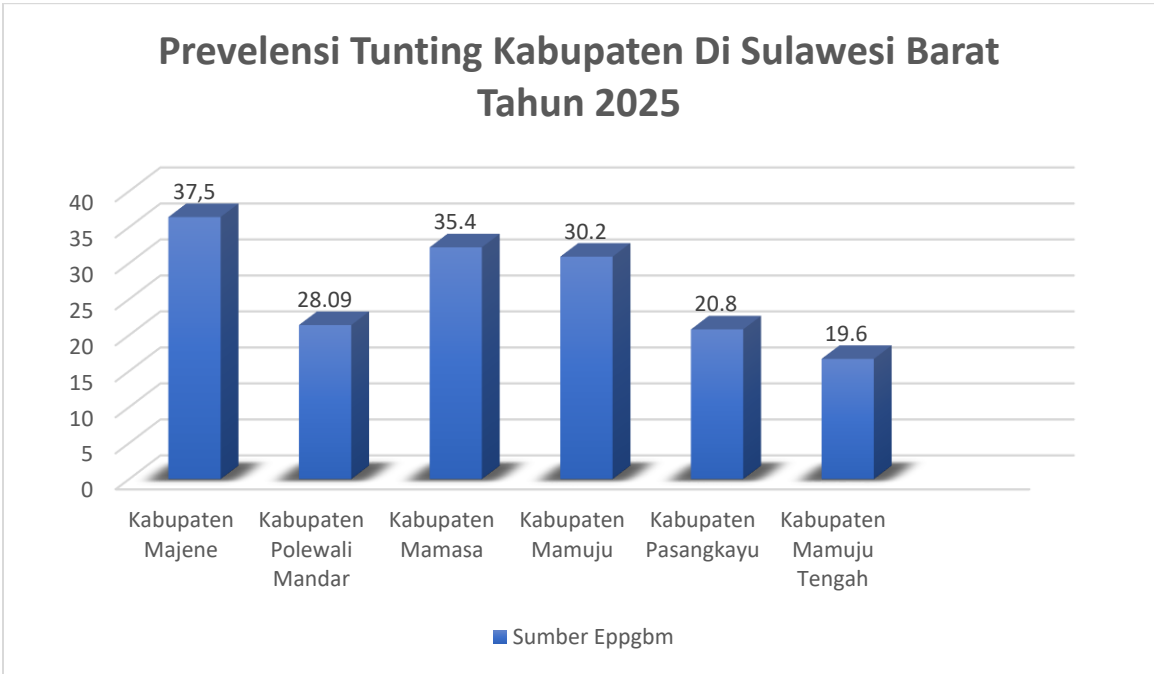


Dengan Realisasi, IPM sebesar 69,17, Kabupaten Mamuju Tengah menempati posisi ke-4 di antara 4 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang telah rilis nilai IPM nya, dengan Kabupaten Mamuju sebagai yang tertinggi dengan IPM sebesar 72,77.

Pada tahun 2025.

IPM di tiga kabupaten di Sulawesi Barat berstatus “tinggi” dan untuk kabupaten Mamuju Tengah berstatus “sedang” pada tahun 2025.

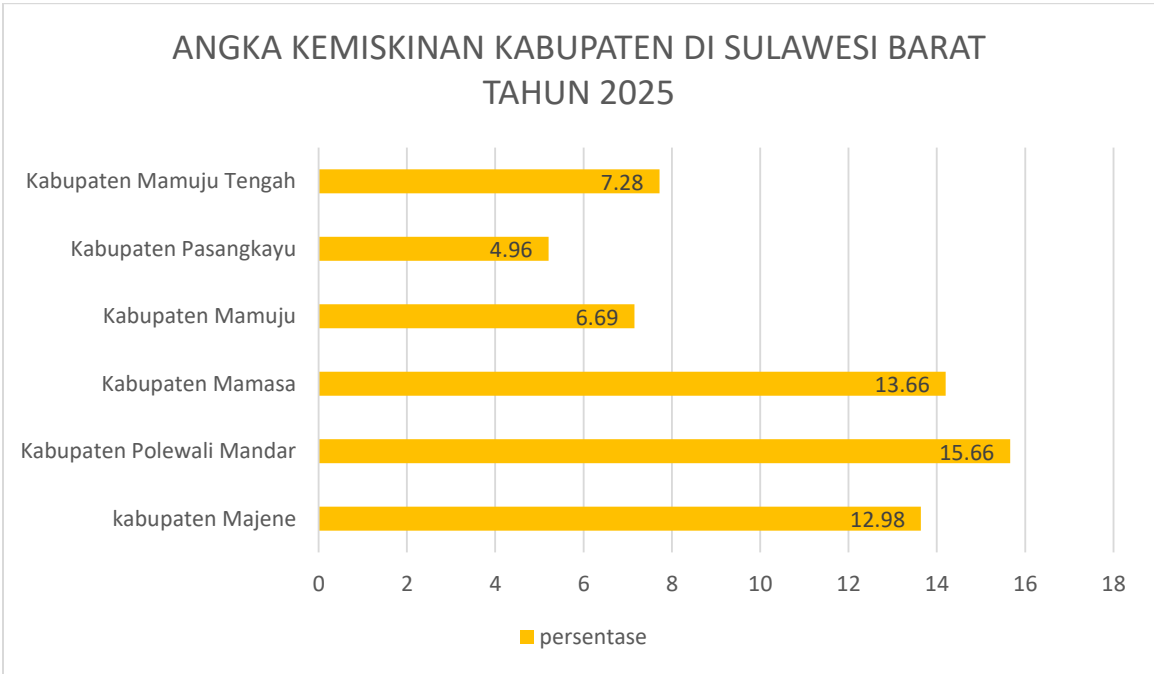
Prevelensi Stunting



Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa Kabupaten Mamuju Tengah telah mencapai keberhasilan yang signifikan dalam mengurangi angka stunting, dengan persentase sebesar 19,6%. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada tahun sebelumnya sebesar 2,9% sehingga ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk menekan peningkatan jumlah stunting. Kabupaten Mamuju mengalami penurunan sebesar 1,1%, Kabupaten Mamasa mengalami peningkatan sebesar 3,3%, Kabupaten Polewali mandar mengalami peningkatan sebesar 6,69%, Kabupaten Majene juga mengalami peningkatan sebesar 1,1%.

Jadi rata-rata Kabupaten di Sulawesi Barat mengalami peningkatan angka stunting sehingga angka stunting Sulawesi Barat mengalami peningkatan menjadi 35,4% naik dari angka sebelumnya 30,3%.

b. Angka Kemiskinan

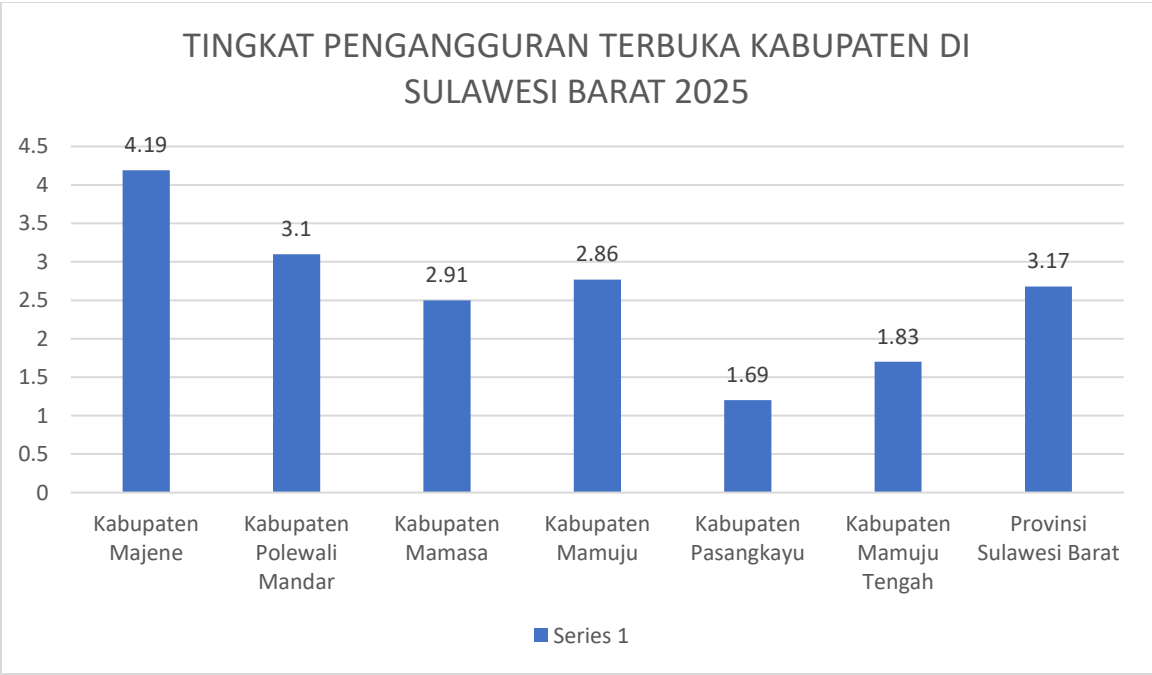


Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah, data bulan Maret 2025 tercatat 7,22 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin di kabupaten Mamuju Tengah turun 0,5 persen yang Dimana pada tahun sebelumnya di angka 7,72 persen.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk pada 2025 di kabupaten Mamuju Tengah ini berjumlah 143,270 ribu jiwa. Dibandingkan dengan wilayah lain di Sulawesi Barat, persentase penduduk miskin di kabupaten/kota ini masuk dalam daftar urutan empat besar.

Wilayah lain dengan persentase penduduk miskin di urutan dua teratas di provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Polewali Mandar 15 persen dan Kabupaten Mamasa 13 persen.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka



terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Majene mencapai 4,19% (data 2024), menempati posisi tertinggi di antara kabupaten-kabupaten di Sulawesi Barat. Di sisi lain, Kabupaten Pasangkayu memiliki TPT terendah, yaitu sebesar 1,69%. Kabupaten Mamuju Tengah juga memiliki TPT yang relatif rendah, yaitu sebesar 1,83% namun mengalami peningkatan sebesar 1% dari tahun sebelumnya, Dan berada pada urutan ke dua terendah. Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, dan Mamasa memiliki TPT yang relatif sedang, yaitu sebesar 3,1%, 2,86%, dan 2,91%.

Dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi TPT, pemerintah kabupaten Mamuju Tengah akan terus mengembangkan kebijakan yang tepat, seperti mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan akses ke pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, diharapkan TPT di Mamuju Tengah dapat terus menurun dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.

5. Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

N o	Sasaran	Iku	Tahun 2025			Analis Keberhasilan/ Kegagalan	Faktor Pendukung/Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah				1.	
						2.	
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,2	69,17	98,5	keberhasilan IPM ini antara lain 1. Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang signifikan, tercermin dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat. Salah satu indikator utama, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, mencapai angka 70,02 tahun, menunjukkan harapan hidup yang lebih panjang dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya.	Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan yang memadai dapat berkontribusi pada peningkatan Umur Harapan Hidup masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih panjang dan sehat.
						2. Peningkatan aksesibilitas pendidikan dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Peningkatan kualitas guru dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan memahami kurikulum, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan guru yang profesional dan kompeten dalam menjalankan tugasnya.
		Prevalensi Stunting	14	19.6%	71,4	Kegagalan dalam mencapai kesehatan yang optimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya konsumsi makanan bergizi seimbang dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya asupan nutrisi sejak kehamilan pada ibu. Hal ini dapat berdampak	Upaya pencegahan dan penanganan stunting dilakukan melalui berbagai program dan intervensi, termasuk pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, skrining anemia, serta pemberian makanan tambahan lokal untuk ibu hamil dan balita yang

						pada kesehatan ibu dan anak, serta dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.	mengalami masalah gizi. Selain itu, program seperti Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), lokakarya mini stunting, rembuk stunting, dan tim pendamping keluarga stunting (TPK) juga dilaksanakan. Inovasi seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dan pemberian makan bergizi kepada keluarga berisiko stunting melalui donasi orang tua asuh turut mendukung upaya ini.
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	7.32	7.28	100,5	Faktor keberhasilan didukung oleh sinergi program bantuan social (PKH), Pemberdayaan ekonomi Masyarakat, Peningkatan akses Pendidikan, dan Kesehatan, Pembangunan infrastruktur dan stabilisasi harga bahan pokok juga berperan penting dan mengurangi beban pengeluaran Masyarakat miskin	Meningkatkan sektor penopang selain sektor perkebunan, lapangan usaha ramah wanita kepala rumah tangga, pengurangan beban pengeluaran, pengendalian inflasi, dan prioritas infrastruktur dasar.
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1.5	1.83%	81,96	Upaya meningkatkan jumlah lapangan kerja di sektor formal dan informal dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil, sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, serta mengurangi Tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah	Melakukan program-program perluasan kesempatan kerja dan memberikan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	3.58	5,08	141,9	Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terampil, kemajuan teknologi dan pengelolaan SDA yang efisien serta didukung oleh program Pemerintah yang pro pertumbuhan	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan berbagai upaya untuk mencapai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto persen pada tahun 2025, termasuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor unggulan, peningkatan investasi, pengembangan pengadaan listrik dan gas, serta peningkatan pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT).
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100	Didukung oleh komitmen pimpinan yang kuat, perubahan budaya kerja, penyederhanaan struktur organisasi, digitalisasi layanan dan peningkatan kompetensi ASN	Kabupaten Mamuju Tengah melakukan evaluasi dan memenuhi indikator Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025
		NILAI LPPD	3.1			LPPD sudah dibuat dan ditetapkan tetapi belum dapat di analisis karena nilai lppd tahun 2025 belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri	
		OPINI BPK	WTP	WTP	100	Pengelolaan keuangan yang baik mencakup penganggaran yang efektif, pengeluaran yang terkendali,	Pemerintah Daerah (Pemda) perlu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

						dan pengelolaan aset yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang efektif, memperkuat pengendalian internal atas transaksi keuangan, melakukan rekonsiliasi secara berkala antara eksternal dan internal, serta menyusun laporan keuangan yang akurat dan lengkap sesuai dengan SAP. Komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan dan kemampuan SKPD dalam mengendalikan temuan yang merugikan daerah juga sangat penting.
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100	25	25	Faktor kendala operasional sumber daya dan factor eksternal	a) Meningkatkan penegakan hukum b) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama c) Meningkatkan kualitas SDM personal d) Meningkatkan partisipasi masyarakat
7	Terpeliharabya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd)(Nilai)	75.32	83,48	110,8	Keberhasilan ini didorong oleh manajemen limbah yang efektif, peningkatan sanitasi serta kebijakan pemerintah yang pro lingkungan	Melakukan sosialisasi pencegahan pencemaran di Daerah Aliran Sungai

6. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

No	Sasaran	Iku	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah		Program penyelenggara jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten (%)	Menunjang
				Program Pengelola Dan pengembangan sistem air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten (%)	Menunjang
				Program penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota0	Menunjang
				Program kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Tertangani	Menunjang
				Program pengembangan perumahan	persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena dampak relokasi program pemerintah daerah	Menunjang

				Program penelitian dan pengembangan daerah	Cakupan Inovasi, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan	Menunjang
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	98,5	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Menunjang
				Program pengelolaan Pendidikan	Rata-rata APM SD/MI, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan	Menunjang
		Prevalensi Stunting	71,4	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Menunjang
				Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial	Menunjang
				Program pengelolaan Pendidikan	Rata-rata APM SD/MI, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan	Menunjang
				Program Pengelola Dan pengembangan sistem air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten (%)	Menunjang
				Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Menunjang
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	100,5	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial	Menunjang
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian	Menunjang
		Tingkat Pengangguran Terbuka	81,96	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Menunjang
				Program perencanaan tenaga kerja	Persentase Rencana Tenaga Kerja	Menunjang
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	141,9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian	Menunjang
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	100	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kinerja dan Reformasi Birokras	Menunjang
		NILAI LPPD		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Capain Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Menunjang

		OPINI BPK	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penurunan jumlah temuan hasil pengawasan	Menunjang
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	25	Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dapat di selesaikan	Menunjang
7	Terpeliharabnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd)(Nilai)	110.8	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Cakupan Wilayah Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menunjang

7. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Iku	Indikator Kinerja Tahun 2025			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	62.61						
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,2	69,17	98,5	93.629.362.917,5	90.290.650.346	96.4	3,6
		Prevalensi Stunting	14	19.6	71,4	53.715.613.507,4	51.278.111.737	95,4	4.6
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	7.32	7.28	100,5	1.660.286.332	1.258.832.278	75.8	24.2
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1.5	1.83	81,96	360.000.000	218.269.187	60.6	39.4
54	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	3.58	5,08	141,9	1.660.286.332	1.258.832.278	75.8	24.2
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100	209.879.533	206.688.061	100	0
		NILAI LPPD	3.1	-	-	209.879.533	206.688.061	98.4	1.6
		OPINI BPK	WTP	WTP	100	66.468.000	66.463.200	99.9	1
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100	25	25	2.765.062.477	2.600.460.300	94	6
7	Terpeliharabnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd)(Nilai)	75.32	83,48	110,8				

3.2 Akuntabilitas Keuangan

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	Program Penyelenggara Jalan		

2	Program Pengelola Dan Pengembangan Sistem Air Minum		
3	Program Penyelenggara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Rp.717.680.241	Rp.684.268.915
4	Program Kawasan Permukiman	Rp. 188.527330	Rp. 188.033.182
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 260.578.687	Rp. 260.496.100
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 53.609.226.970.42	Rp.51.278.111.737
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 40.020.136.447.04	Rp.39.012.538.609
8	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 220.000.000	Rp. 94.175.974
9	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 360.000.000	Rp. 218.269.187
10	Program Perlindungan Dan Jaminan Social	Rp. 106.386.537	Rp.
11	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.660.286.332	Rp 1.258.832.278
12	Program Peningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.765.062.477	Rp.2.600.460.300
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.14.697.372.303	Rp.14.697.372.303
14	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.	Rp.
15	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	Rp.

BAB IV

PENUTUP

Dengan demikian, LKJIP Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 ini telah menyajikan capaian kinerja yang telah dicapai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. LKJIP ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis dan melakukan perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan LKJIP ini, diharapkan Kabupaten Mamuju Tengah dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. LKJIP Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan melakukan pembangunan daerah

